

Menumbuhkan Tanggung Jawab Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai

Mas Fierna Janvierna Lusie Putri ^{a,1}, Dini Yuli Astuti^{b,2*}, Mutiara Rahmat^{c,3}, Nadila Febriyanti^{d,4}, Nur Awlia Putri^{e,5}, Zahrani Salwa Azizah^{f,6}

^{a,b,c,d,e,f} Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

¹dosen02649@unpam.ac.id ^{2*}diniyuliaaa1607@gmail.com ³Mutiararahmat4@gmail.com

⁴Nadilanti05@gmail.com ⁵awliaputri25@gmail.com ⁶zahransalwaazizah@gmail.com

* Corresponding Author: diniyuliaaa1607@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 27 September 2025 Direvisi: 25 Oktober 2025 Disetujui: 20 November 2025 Tersedia Daring: 1 Desember 2025</p> <p><i>Kata Kunci:</i> <i>Kata Kunci kurikulum</i> <i>Kata Kunci nilai</i> <i>Kata Kunci Pendidikan kewarganegaraan</i> <i>strategi pembelajaran</i> <i>tanggungjawab sosial</i></p>	<p>Artikel ini merupakan hasil kajian literatur yang membahas peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis nilai dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial, dengan menyoroti landasan teori, strategi pembelajaran, peran guru dan kurikulum, tantangan implementasi, serta implikasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKn berbasis nilai berpengaruh signifikan dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, jujur, peduli, demokratis, serta memiliki kesadaran sosial. Strategi pembelajaran yang efektif meliputi project-based learning, service learning, dan civic engagement, yang mendorong keterlibatan nyata siswa dalam masyarakat. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pelatihan guru, evaluasi berbasis ujian, ketimpangan sumber daya, serta pengaruh media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum berbasis aksi, pelatihan pedagogis bagi guru, kemitraan sekolah dengan komunitas, dan instrumen penilaian autentik untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PKn.</p>

ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <i>action-based curriculum</i> <i>value</i> <i>civic education</i> <i>teaching strategi</i> <i>social responsibility</i></p> <p><i>This article is a literature review that discusses the role of value-based Civic Education in fostering social responsibility, focusing on theoretical foundations, teaching strategies, the role of teachers and curriculum, implementation challenges, and policy implications. The method used is a literature review, by analyzing relevant journal articles, books, and previous studies. The findings show that value-based Civic Education significantly influences the formation of students' character to be religious, honest, caring, democratic, and socially aware. Effective teaching strategies include project-based learning, service learning, and civic engagement, which encourage students' real involvement in society. However, implementation still faces challenges such as limited teacher training, exam oriented evaluation, resource inequality, and the influence of digital media. Therefore, strengthening action-based curricula, providing pedagogical training for teachers, building school-community partnerships, and developing</i></p>

authentic assessment instruments are required to achieve the objectives of Civic Education.

© 2025, Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, Dini Yuli Astuti, Mutiara Rahmat, Nadila Febriyanti, Nur Awlia Putri, Zahrani Salwa Azizah

This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: Putri, M. F. J. L., Astuti, D. Y., Rahmat, M., Febriyanti, N., Putri, N. A., & Azizah, Z. S. (2025). Menumuhkan Tanggung Jawab Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai . Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 5(2), 43-49. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3227>

1. Pendahuluan

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang esensial dalam membentuk warga negara yang aktif, peduli, serta mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dulu. Melalui pembelajaran yang dirancang secara sistematis, PKn tidak hanya diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk sikap serta perilaku sosial yang konstruktif.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses sistematis yang bertujuan mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu agar berkembang secara pribadi sekaligus berkontribusi positif dalam masyarakat (Lestari, 2022). Pentingnya pendidikan tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas intelektual, tetapi juga dalam pembentukan karakter, moral, dan etika yang baik. Moral dan etika menjadi aspek penting karena membantu individu memahami perbedaan antara yang benar dan salah, membentuk perilaku yang bertanggung jawab, serta menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain maupun lingkungan (Sari, 2021).

Berbagai teori pendidikan menekankan bahwa nilai kewarganegaraan lebih efektif diinternalisasi melalui pendekatan pedagogis berbasis pengalaman, refleksi, dan aksi kolektif. Konsep pembelajaran berbasis aksi seperti service learning, project-based learning, dan civic engagement terbukti mampu menghubungkan pengetahuan dengan realitas kehidupan masyarakat.

Menekankan bahwa PKn merupakan mata pelajaran multidisiplin yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan untuk membangun kepribadian warga negara yang demokratis. Dalam kurikulum nasional Indonesia, PKn diarahkan untuk membangun identitas nasional, rasa cinta tanah air, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial Winataputra (2020). Dengan demikian, pembelajaran PKn berbasis nilai menuntut keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, bukan sekadar transfer informasi semata.

Meskipun kedudukan PKn di sekolah sangat strategis, praktik pembelajarannya seringkali masih bersifat kognitif dan normatif. Transformasi nilai yang seharusnya tercermin dalam perilaku nyata belum sepenuhnya terwujud. Di era global dan digital,

muncul tantangan baru berupa disinformasi, individualisme, serta menurunnya kepedulian sosial generasi muda, yang semakin memperlemah efektivitas PKn jika tidak disertai pembaruan pendekatan pembelajaran.

Secara normatif, kurikulum PKn menuntut peserta didik memiliki sikap bertanggung jawab, peduli, dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, capaian tersebut masih jauh dari optimal. Hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dengan perilaku sosial peserta didik, di mana tingkat keterlibatan dalam aksi sosial maupun kepedulian terhadap isu kebangsaan masih rendah. Kesenjangan ini menjadi dasar penting perlunya kajian literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pembelajaran PKn berbasis nilai.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti efektivitas PKn dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan pemahaman hukum. Namun, kajian yang secara spesifik menekankan pada integrasi nilai dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial melalui pendekatan berbasis aksi masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial peserta didik, dengan menyoroti landasan teori, praktik pembelajaran efektif, tantangan implementasi, serta rekomendasi kebijakan dan praktik yang relevan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian menambahkan bahwa studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan daftar pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian tertulis yang sesuai (Zed, 2008). Sementara itu, menjelaskan bahwa penelitian jenis ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah sumber ilmiah yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Warsinah, 2009). Dengan kata lain, studi literatur dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang Pendidikan Kewarganegaraan berbasis nilai dan kaitannya dengan pembentukan tanggung jawab sosial peserta didik.

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi artikel jurnal, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan akademik yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu terbit dalam sepuluh tahun terakhir, berasal dari penerbit atau jurnal yang kredibel, memiliki metodologi yang jelas, serta relevan dengan tema penelitian. Sebaliknya, literatur yang bersifat opini non-ilmiah atau tidak sesuai dengan fokus penelitian dikecualikan.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penentuan kata kunci pencarian seperti “Pendidikan Kewarganegaraan”, “nilai kewarganegaraan”, “tanggung jawab sosial”, dan “civic engagement”. Kedua, pencarian literatur menggunakan basis data elektronik seperti Google Scholar, Scopus, dan database perpustakaan universitas. Ketiga, seleksi awal dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk memastikan relevansi. Artikel yang lolos tahap ini kemudian ditelaah secara penuh untuk dicatat teori, hasil, serta implikasinya. Selanjutnya, data yang terkumpul direduksi dan dikelompokkan berdasarkan tema, seperti landasan teori, praktik pembelajaran, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Tahap terakhir adalah sintesis,

yaitu mengintegrasikan hasil temuan menjadi kesimpulan yang menyoroti peran PKn berbasis nilai dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab sosial merupakan nilai penting didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dengan menerapkan tanggung jawab sosial didalam diri seseorang berarti seseorang itu sudah menjadi warga negara yang baik apalagi tanggung jawab sosial mengajarkan kita sebagai warga negara untuk bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-4 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan adanya rasa tanggung jawab sosial didalam diri seseorang itu sudah menjadi nilai penting untuk kehidupan bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan juga sangat penting diajarkan kepada masyarakat Indonesia dengan adanya pendidikan kewarganegaraan masyarakat akan menjadi lebih aware lagi terhadap tanggung jawabnya sebagai masyarakat Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sudah harus diajarkan sejak duduk dibangku sekolah dasar hingga keperguruan tinggi karena akan berpengaruh penting untuk mewujudkan cita-cita leluhur bangsa, apalagi pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai yang dimana banyak sekali makna penting yang terkandung didalamnya bukan hanya menjadi warga negara yang baik tetapi juga akan terus mengingat perjuangan para pendiri bangsa Indonesia.

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis bukti empiris pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap tanggung jawab sosial, mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif, menganalisis peran guru dan kurikulum, menganalisis tantangan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai dan menganalisis implikasi kebijakan dan praktik.

A. Dampak dan Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Tanggung Jawab Sosial

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap etika bangsa dalam kehidupan bersosial sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter individu yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Dalam proses pengimplementasian nilai, terdapat nilai karakter dan nilai pokok yang bisa diajarkan. Nilai karakter utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk menciptakan peserta didik yang religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, dan peduli. Sedangkan nilai karakter utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk menciptakan peserta didik yang nasionalis, patuh pada aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan mandiri. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya toleransi, keadilan, dan rasa kebersamaan.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mencegah perilaku negatif seperti korupsi, intoleransi, dan pelanggaran hukum. Karakter seseorang menunjukkan bagaimana mereka bertindak. Orang yang tidak jujur, kejam, atau rakus menunjukkan perilaku atau karakter negatif. Sebaliknya, orang yang jujur dan suka menolong menunjukkan perilaku atau karakter positif. (Suhardiyansyah et al., 2016).

Berlandaskan pada pemahaman yang baik tentang hukum dan aturan, individu lebih cenderung mematuhi peraturan dan memiliki sikap yang lebih tertib. Hal ini berujung pada terciptanya masyarakat yang lebih aman dan tertib. Jika kita bergerak lebih jauh lagi dalam mengamati, Pendidikan Kewarganegaraan membantu memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air.

Melalui pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa, individu menjadi lebih bangga dan bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Rasa cinta tanah air juga mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan memberikan pengaruh yang luas dan mendalam dalam membentuk moral dan etika bangsa. Hal ini tidak hanya terlihat dalam perilaku individu, tetapi juga dalam dinamika sosial yang lebih harmonis dan beradab. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang kuat dan bermartabat dalam menumbuhkan tanggung jawabnya.

B. Strategi Pembelajaran Efektif

Strategi pembelajaran yang paling konsisten menunjukkan efektivitas dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial meliputi project-based learning, service learning, diskusi deliberatif, simulasi peran, dan kegiatan nyata berbasis aksi sosial. Pendekatan service learning secara khusus memberikan kesempatan peserta didik untuk menghubungkan nilai dengan pengalaman nyata, melakukan refleksi kritis, dan mengembangkan empati melalui keterlibatan langsung dalam komunitas.

C. Peran Guru dan Kurikulum

Keberhasilan implementasi pembelajaran PKn berbasis nilai sangat bergantung pada kapasitas guru dan fleksibilitas kurikulum. Guru yang memiliki kompetensi pedagogis dalam fasilitasi diskusi nilai dan asesmen autentik terbukti lebih mampu mendorong internalisasi nilai pada peserta didik. Kurikulum yang menyediakan ruang untuk kegiatan kontekstual, praktik kolaboratif, serta penilaian berbasis portofolio mendukung terbentuknya tanggung jawab sosial secara lebih nyata. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi yang dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum impelmentasi merupakan realisasi dari kurikulum dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jika ada kurikulum berarti ada pembelajaran begitu pun sebaliknya jika ada pembelajaran berarti ada kurikulum.

D. Tantangan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai

Implementasi pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pelatihan guru, tekanan sistem evaluasi berbasis ujian, ketimpangan sumber daya antar sekolah, dan pengaruh media sosial yang menyebarkan disinformasi serta memperkuat individualisme. Evaluasi nilai dan perilaku sosial juga cenderung sulit diukur dengan instrumen standar sehingga memerlukan metode asesmen alternatif yang lebih autentik. Dengan adanya asesmen alternatif yang lebih autentik atau jelas tantangan tersebut bisa diatasi dengan baik, apalagi bagi pelatihan guru yang sangat penting, guru yang dapat pelatihan akan menjadikan guru tersebut menjadi

guru yang profesional dalam mengajar dan akan mengurangi ketimpangan sumber daya antar sekolah.

E. Implikasi Kebijakan dan Praktik

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan, antara lain pengembangan kurikulum yang menekankan pembelajaran berbasis aksi, pelatihan guru yang berfokus pada pedagogi nilai, penyediaan sumber daya untuk memperkuat kemitraan sekolah dengan komunitas, serta pengembangan instrumen penilaian yang mampu mengukur dimensi afektif dan konatif selain aspek kognitif.

Kurikulum harus dirancang ulang untuk tidak hanya berfokus pada teori, tetapi harus memberikan siswa pengalaman yang nyata untuk meningkatkan pengetahuan siswa, tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan kognitif siswa. Guru juga perlu dilatih dengan metode pengajaran pedagogi yang mengajarkan, menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dengan tujuan untuk membekali guru agar mampu menjadi teladan fasilitator bagi siswa nya.

Sekolah juga harus dialokasikan sumber daya (dana, waktu, staff dan fasilitas) untuk secara aktif untuk memudahkan kerja sama dengan instansi lain, tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif yang memungkinkan siswa akan mempraktikkan nilai dan keterampilan mereka didalam kehidupan nyata. Sistem penilaian juga harus diperluas menjadi alat penilaian yang mengukur sikap, motivasi, karakter dan kesiapan siswa untuk bertindak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis nilai berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, jujur, peduli, demokratis, serta bertanggung jawab secara sosial. Strategi pembelajaran berbasis aksi, seperti project-based learning, service learning, dan civic engagement, terbukti efektif dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial karena menghubungkan teori dengan praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan implementasi PKn berbasis nilai sangat bergantung pada kapasitas guru, fleksibilitas kurikulum, serta penggunaan asesmen autentik yang menilai aspek kognitif, afektif, dan konatif peserta didik.

Namun demikian, implementasi PKn masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pelatihan guru, evaluasi yang cenderung berorientasi pada ujian, ketimpangan sumber daya antar sekolah, serta pengaruh negatif media digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui penguatan kurikulum berbasis aksi, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan pedagogis, pembangunan kemitraan antara sekolah dan komunitas, serta pengembangan instrumen penilaian yang komprehensif. Dengan demikian, PKn tidak hanya menjadi mata pelajaran normatif yang berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga wahana pembentukan warga negara aktif yang mampu berkontribusi bagi kesejahteraan bersama dan menjawab tantangan zaman.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah *Pendidikan Kewarganegaraan* Universitas Pamulang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan referensi ilmiah yang bermanfaat selama proses penulisan. Artikel ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa kontribusi dan kerja sama dari seluruh anggota kelompok.

6. Daftar Pustaka

- Campbell, David E. "What Social Scientists Have Learned About Civic Education: A Review of the Literature." *Annual Review of Political Science* 22 (2019): 1–23.
- Daniel, E., & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Pancasila.
- Dhani, R. R. (2020). Peran guru dalam pengembangan kurikulum. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 45-50.
- Grant, Maria J., and Andrew Booth. "A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies." *Health Information & Libraries Journal* 26, no. 2 (2016): 91–108.
- Kolb, David A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
- Lestari, D. I. (2022). Kajian pendidikan Pancasila dalam revitalisasi moral bangsa. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 57-68.
- Mardawani, M. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2025.
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa (pentingnya rumusan butir-butir Pancasila sebagai dasar pendidikan moral dan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Journal of Education*, 2(1), 0121.
- Suhardiyansyah, M. Y., Budiono, B., & Widodo, R. (2016). Implementasi pendidikan karakter melalui bidang studi pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 1(1), 1.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor